

PERAN ASEAN-IPR DALAM MEMBANGUN BUDAYA PERDAMAIAN DI ASIA TENGGARA

Baiq Yayan Sukma Dewi¹, Syaiful Anam², Heavy Nala Estriany³

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

²Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

³Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

yayansukma2@gmail.com

ABSTRACT

Several conflicts that are still occurring in Southeast Asia show that the region still really needs a culture of peace. ASEAN-IPR as one of the organizations under the auspices of ASEAN tries to play its role in building a culture of peace in Southeast Asia. Therefore, the aim of this research is to see the extent of the role of ASEAN-IPR in building a culture of peace in Southeast Asia. This research is descriptive qualitative in nature using the concept of the role of international organizations and concept sculture of peace. The results of this research then show that ASEAN-IPR is able to play a role in building a culture of peace in Southeast Asia through various efforts such as holding training, discussions and practices related to peace and reconciliation, as well as being able to provide a forum for negotiation, dialogue and providing policy recommendations. Thus, it can be concluded that ASEAN-IPR has carried out its role quite well, although it cannot stop violence, but at least it has helped in building a culture of peace in Southeast Asia.

Keywords : *International Organizations, ASEAN-IPR, Culture of Peace, Southeast Asia.*

ABSTRAK

Beberapa konflik yang masih terjadi di kawasan Asia Tenggara menunjukkan bahwa kawasan tersebut masih sangat membutuhkan budaya perdamaian. ASEAN-IPR sebagai salah satu organisasi di bawah naungan ASEAN mencoba untuk memberikan perannya dalam membangun budaya perdamaian di Asia Tenggara. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana peran dari ASEAN-IPR dalam membangun budaya perdamaian di Asia Tenggara. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan konsep peranan organisasi internasional dan konsep *culture of peace*. Hasil penelitian ini kemudian menunjukkan bahwa ASEAN-IPR mampu berperan dalam membangun budaya perdamaian di Asia Tenggara melalui berbagai upaya seperti mengadakan pelatihan, diskusi, dan praktik terkait perdamaian dan rekonsiliasi, serta mampu memberikan wadah untuk bernegosiasi, berdialog, maupun memberikan rekomendasi kebijakan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ASEAN-IPR telah melaksanakan perannya dengan cukup baik, walaupun tidak bisa menghentikan kekerasan namun setidaknya telah membantu dalam membangun budaya perdamaian di Asia Tenggara.

Kata Kunci : Organisasi Internasional, ASEAN-IPR, Budaya Damai, Asia Tenggara.

PENDAHULUAN

Pembentukan ASEAN di kawasan Asia Tenggara tidak dapat menjamin bahwa tidak akan ada konflik regional antar negara-negara anggotanya.¹ Beberapa konflik antar-negara di kawasan Asia Tenggara kerap terjadi, terutama pada konflik sengketa wilayah, dimana beberapa wilayah atau pulau diklaim sebagai milik wilayah negara satu dan yang lain. Di samping itu, tak sedikit juga beberapa konflik yang terjadi menimbulkan tindak kekerasan bahkan perang.² Beberapa konflik yang terjadi antar-negara di Asia Tenggara antara lain adalah konflik Thailand Selatan, konflik Thailand-Kamboja, konflik Spratly Island, konflik Sipadan dan Ligitan, konflik Myanmar dan lain sebagainya. Konflik yang terjadi di Thailand Selatan disebabkan karena masyarakat minoritas di wilayah tersebut tidak diakui oleh pemerintah dan kaum mayoritas Thailand, yang mana hal tersebut membuat munculnya sebagian kelompok yang ingin memisahkan diri. Keinginan tersebut ditunjukkan melalui adanya gerakan-gerakan separatisme dan pemberontakan dari masyarakat yang dirugikan.³ Di sisi lain, konflik sengketa yang terjadi di antara Thailand dan Kamboja disebabkan karena perebutan wilayah di sekitar Candi Preah Vihear yang terletak diantara Propinsi Preah Vihear Kamboja dan dekat distrik Kantharalak Thailand.⁴ Konflik sengketa ini pun menempuh berbagai macam cara untuk mencapai kesepakatan dalam penyelesaiannya.⁵

Selanjutnya konflik kepulauan Spratly yang merupakan pulau karang yang terletak di Laut China Selatan, melibatkan 4 (empat) negara ASEAN yaitu Vietnam, Filipina, Brunei dan Malaysia, dengan Cina dan Taiwan dalam konflik persengketaan wilayah.⁶ Beberapa negara tersebut mengklaim pulau tersebut berdasarkan sejarah ataupun berdasarkan *United Nations Convention on the Law Of the Sea (UNCLOS)* 1982.⁷ Kemudian terkait kepemilikan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan antara Indonesia dengan Malaysia yang sudah terjadi sejak 1969, kedua pulau tersebut diklaim oleh kedua negara sebagai bagian dari wilayahnya.⁸ Hingga

¹ Jerry Indrawan, 'Mekanisme Resolusi Konflik Di ASEAN: ASEAN Sebagai Fasilitator Konflik', *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, (2021), <<https://doi.org/10.26593/jihi.v17i2.3830.172-185>>.172–185.

² UMY, "ASEAN Contoh Kawasan Yang Bisa Selesaikan Konflik Dengan Damai," 2016, <https://www.umi.ac.id/asean-contoh-kawasan-yang-bisa-selesaikan-konflik-dengan-damai.5-6>.

³ S Sani, "Analisis Resolusi Konflik Di Thailand Selatan: Melalui Pendekatan Teori Collective Identity," 2019, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/18450%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/18450/15323129.pdf?sequence=11&isAllowed=y.12>.

⁴ Elfia Farida, "Penyelesaian Sengketa Perbatasan Antara Thailand Dan Kamboja Melalui Mekanisme Asean," *Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, 43, no. 1 (2014): 57–66.

⁵ Rezky Ramadhan Antuli, Dudy Heryadi, and Teuku Rezasyah, 'Analisis Peran Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Thailand Dan Kamboja Melalui Pendekatan National Role Conception', *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 11.2 (2019), <<https://doi.org/10.24114/jupiiis.v11i2.14131>>. 448.

⁶ Luh Gde et al., "Peran Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Internasional Di Laut Cina Selatan," *Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2022): 225.

⁷ Muhammad Nasir and Wan Siti Adibah Wan Dahalan, "Penyelesaian Pertikaian Kepulauan Spratly : Memanfaatkan Perjanjian Pembangunan Bersama," *Jurnal Ilmu Hukum REUSAM VI* No.1 (2017): 19–40.

⁸ Choirunnisa Nur Novitasari, 'Analisis Putusan Mahkamah Internasional Dalam Kasus Sengketa Indonesia-Malaysia Mengenai Pulau Sipadan Dan Ligitan', *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, (2021), <<https://doi.org/10.15294/digest.v2i2.48638>>. 231-262.

akhirnya kedua negara sepakat akan adanya *Memorandum Of Understanding* (MOU) yang menetapkan bahwa pulau Sipadan dan Ligitan dalam *Status Quo* yang artinya tidak boleh diduduki, ditempati, maupun dimanfaatkan oleh kedua negara yang terlibat.⁹ Kasus tersebut akhirnya dibawa dan diselesaikan melalui Mahkamah Internasional.¹⁰

Selanjutnya ialah akar konflik dari masalah yang terjadi di Myanmar pada tahun 2017 merupakan konflik etnis antara etnis mayoritas Rahkine dengan etnis Rohingya yang mana etnis Rohingya diperlakukan tidak adil oleh pemerintah Myanmar. Sehingga diskriminasi terhadap etnis Rohingya pun kerap terjadi, yang kemudian menjadi lebih buruk ketika mulai terjadinya tindakan-tindakan kekerasan secara terbuka.¹¹ ASEAN mencoba merespon konflik Rohingya secara hati-hati, karena ASEAN menganut prinsip non-intervensi.¹² Beberapa konflik yang terjadi di Asia Tenggara tersebut masih belum terselesaikan sampai akar masalah, dalam artian tidak semua konflik tersebut berakhir dengan penyelesaian yang sempurna. Hal tersebut pun dikarenakan adanya beberapa hambatan, seperti adanya prinsip ASEAN Way, yang mana ASEAN Way ini merupakan sebuah konsep yang merujuk pada mekanisme kerjasama dan penyelesaian konflik di kawasan Asia Tenggara, yang menunjukkan bahwa ASEAN memiliki cara-cara tersendiri dalam mengatasi permasalahan internal di kawasan.¹³ Selain itu prinsip non-intervensi juga menghambat penyelesaian konflik, yang mana prinsip ini mengemukakan bahwa suatu negara tidak memiliki hak untuk mencampuri urusan atau permasalahan dalam negeri dari negara lain. Patuhnya negara-negara anggota ASEAN terhadap prinsip ini memberikan kesan bahwa konflik-konflik yang terjadi di beberapa negara ASEAN dapat selesai dengan sendirinya, yang padahal ini lebih ke pada inisiatif pihak-pihak yang bertikai untuk mengakhiri konflik dalam mencapai keputusan yang bersifat (*win-win solutions*), dan sebagian konflik lainnya yang belum dapat terselesaikan secara mendasar karena terhambat belum jelasnya mekanisme penyelesaian konflik.¹⁴

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa tak sedikit konflik yang terjadi di Asia Tenggara melibatkan tindak kekerasan yang menimbulkan perang antar negara anggota hingga menelan banyak korban jiwa. Hal tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa budaya perdamaian yang ada di Asia Tenggara masih rentan. Tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa konflik yang telah disebutkan sebelumnya berpotensi untuk terjadi kembali, bahkan akan semakin parah karena tidak terselesaikan sampai akar masalahnya. Sehingga pembangunan budaya perdamaian sangat dibutuhkan dan harus diwujudkan dalam suatu

⁹ Rahaditya Rachman and Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, “Politik Luar Negeri Indonesia - Konflik Sipadan & Ligitan,” no. December (2019). 7-8.

¹⁰ Rusiti, ‘Analisis Kasus Sengketa Kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan’, 2018. 1-5.

¹¹ Triono, “Peran ASEAN Dalam Konflik Etnis Rohingnya,” *Jurnal TAPIS* 10, no. 2 (2014): 1–11.

¹² Dewa Gede Sudika Mangku, “Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingnya : Dalam Perspektif ASEAN,” *Media Komunikasi FIS* 12, no. 2 (2013): 60–69.

¹³ Sukma Sushanti, ‘Persepsi Ancaman Di Kawasan Asia Tenggara - Peran ASEAN Sebagai Primary Driving Force’, 2016, 6.

¹⁴ Erizon Indra, “Kepatuhan Negara-Negara ASEAN Untuk Tidak Campur Tangan Dalam Menangani Persekusi Etnis Rohingnya Di Myanmar,” *Journal of Controlled Release* 11, no. 2 (2018): 430–39.

kawasan, karena pada dasarnya masyarakat ASEAN berhak untuk menikmati perdamaian dan harus berjuang memajukannya.¹⁵

Pentingnya membangun budaya damai dapat dilihat dari upaya yang dilakukan oleh *Indonesia Peace and Conflict Resolution Association (IPCRA)*, Ikatan Alumni Universitas Pertahanan (IKA UNHAN), dan *Asian Pacific Peace Research Association (APRA)* dengan menggelar webinar bertajuk bersama membentuk perdamaian untuk membangun budaya damai di kawasan Asia Tenggara. Tujuan webinar tersebut pun untuk mengingatkan pentingnya pelestarian perdamaian, yang dapat menginspirasi banyak kerjasama antar masyarakat dan keterlibatan nyata dalam membangun budaya damai.¹⁶ Selain itu, ASEAN juga berkolaborasi dengan *United Nations (UN)* dalam memperkuat budaya damai di kawasan Asia Tenggara.¹⁷ Perhatian ASEAN terhadap isu-isu dan masalah keamanan dimulai dengan dicetuskannya suatu komunitas pertama yang telah disepakati bersama, yakni pembentukan *ASEAN Political-Security Community (APSC)*.

Pembentukan APSC ini merupakan suatu upaya untuk mewujudkan Asia Tenggara yang damai dan stabil. Ide pembentukan APSC muncul pertama kali pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-9 di Bali tahun 2003, yang mana ide tersebut merupakan salah satu dari tiga pilar *ASEAN Community Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II)*.¹⁸ APSC bertujuan untuk meyakinkan negara-negara anggota ASEAN untuk hidup dengan damai tidak hanya antara para negara anggota, namun juga dengan negara-negara lain yang bukan anggota ASEAN. APSC merupakan salah satu solusi dan pondasi bagi penerapan lebih lanjut terhadap penanganan masalah keamanan di kawasan Asia Tenggara.¹⁹ Dengan dibentuknya APSC ini diharapkan stabilitas keamanan di kawasan bisa diwujudkan. Padahal dalam realitanya, kawasan ASEAN

¹⁵ Martinus Sardi, 'Dialog Kebangsaan: Membangun Budaya Perdamaian Dalam Perspektif Al Qur ' an', *Repository.Umy.Ac.Id*, 2017, <http://repository.umi.ac.id/bitstream/handle/123456789/13968/Martinus_Sardi_Dialog_Kebangsaan_Membangun_Budaya_Perdamaian_Dalam_Perspektif_Al_Qur'an.pdf?sequence=1>. 1-8.

¹⁶ "IPCRA , IKA Unhan Dan APPRA Menggelar Webinar Bertajuk Bersama Membentuk Perdamaian Untuk Membangun Budaya Damai Di Kawasan Asia Tenggara," 2020. <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://portalbelanegara.com/ipcra-ika-unhan-dan-appra-menggelar-webinar-bertajuk-bersama-membentuk-perdamaian-untuk-membangun-budaya-damai-di-kawasan-asia-tenggara/&ved=2ahUKEwjE9eHWhvn9AhVtR2wGHdXmD9oQFnoECBAQAQ&usq=A0vVaw1rcs ttHD9GGkyf6IRdGj8> diakses pada 24 Maret 2023.

¹⁷ "Kolaborasi ASEAN-UN Diharapkan Perkuat Budaya Damai Di Kawasan," no. April (2013). https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.tabloiddiplomasi.org/kolaborasi-asean-un-diharapkan-perkuat-budaya-damai-di-kawasan/&ved=2ahUKEwj-5q-xh_n9AhVeT2wGHXWhC1kQFnoECA4QAQ&usq=A0vVaw1uomlbgz3bHLOGmNy-0gJ diakses pada 24 Maret 2023.

¹⁸ ASEAN Secretariat, *ASEAN Political-Security Community Blueprint 2025*, 2016. 1-5.

¹⁹ Achmad Zulfikar, 'Efektivitas Peran ASEAN Dalam Mengatasi Masalah Human Security Di Kawasan Asia Tenggara', 2017, <<https://doi.org/10.31227/OSF.IO/8Q264>>. 1-15.

masih menghadapi berbagai masalah politik dan keamanan yang serius, seperti konflik etnis, *human trafficking*, terorisme, konflik perbatasan, dan lain sebagainya.²⁰

Salah satu konflik di Asia Tenggara yang hingga sampai saat ini belum terselesaikan ialah konflik berkepanjangan antara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan negara-negara ASEAN atas Laut Tiongkok Selatan. APSC dan RRT berupaya menginisiasi penciptaan suatu *Code on Conduct* (COC) yang pada kenyataannya belum memiliki bentuk konkritnya. Bahkan hingga saat ini APSC belum memiliki suatu pedoman-pedoman hukum selain mengandalkan Hukum Internasional maupun ketentuan regional dalam menyelesaikan sengketa LTS tersebut.²¹ Beberapa kendala yang dihadapi APSC dalam mengefektifkan implementasi dari APSC itu sendiri diantaranya ialah belum semua negara ASEAN meratifikasi kesepakatan yang telah diambil, posisi sekretarian ASEAN yang kurang mempunyai power dari sekedar bertugas menjadi koordinator, dan persoalan dalam hal pendanaan yang terbatas. Selain itu, tantangan yang paling mendasar yang dihadapi oleh APSC ialah kurangnya pengetahuan dari individu masyarakat di ASEAN tentang APSC dan kekhawatiran campur tangan dari pihak luar terhadap pembentukan APSC.²² Beberapa hal tersebut kemudian menunjukkan bahwa upaya dari APSC saja belum cukup untuk menghadapi berbagai konflik keamanan dan perdamaian di Asia Tenggara.

Sehingga muncul lah suatu organisasi yang mampu berkontribusi dalam upaya perdamaian dan rekonsiliasi, yaitu *ASEAN Institute for Peace and Reconciliation* (ASEAN-IPR). Pembentukan ASEAN-IPR ini merupakan bentuk konkret dari implementasi Cetak Biru Komunitas Politik-Keamanan ASEAN (*ASEAN Political-Security Community Blueprint*) sebagai salah satu dari tiga pilar ASEAN. Pembentukan organisasi tersebut dimaksudkan untuk menjadi sebuah wadah kerjasama bagi aktor negara dan non negara untuk mencegah dan menghentikan konflik. ASEAN-IPR juga merupakan tindak lanjut dari *ASEAN Leaders Joint Statement on the Establishment of an ASEAN Institute for Peace and Reconciliation* yang diadopsi pada tanggal 8 Mei 2011 dan ASEAN-IPR diluncurkan pada pembukaan KTT ASEAN ke-21 di Peace Palace, Phnom Penh, ibukota Kamboja. Organisasi ini secara resmi dibentuk dengan harapan dapat menjadi tumpuan bagi negara-negara yang tergabung dalam ASEAN untuk menyelesaikan konflik internal. Kemudian dapat dikatakan bahwa ASEAN-IPR ini merupakan sebuah upaya terakhir bagi ASEAN untuk menegaskan kembali komitmen yang dimiliki untuk menciptakan sebuah mekanisme penyelesaian konflik yang benar benar berguna.

Dalam penelitian beberapa jurnal, diantaranya seperti jurnal penelitian milik Fadhila Irfansyah menilai ASEAN-IPR masih belum efektif sebagai mekanisme penyelesaian konflik di Asia Tenggara. Dikatakan belum efektif karena institusi tersebut tercipta hanya berdasarkan preferensi personal presiden Susilo Bambang Yudhoyono saja. Tingkat persepsi beberapa

²⁰ Gonda Yumitro, 'Prosiding Konvenas AIHII VI Mataram, 24 – 28 November 2015', November, 2015, 24–28.

²¹ Soekotjo Hardiwinoto Eivan Prabowo, Muchsin Idris, 'Peran ASEAN Political-Security Community di Dalam Upaya Pencegahan Timbulnya Konflik Bersenjata di Kawasan Asia dan Asia Tenggara', *Diponegoro Law Review*, 5 (2016), 1–15.

²² Lesza Leonardo Lombok, 'Tantangan ASEAN Political – Security Community Dalam Mewujudkan Kawasan yang Aman, Damai dan Stabil di Wilayah Perbatasan dan Pulau – Pulau Terluar', 2018, 4–5.

anggota ASEAN yang minim dan tidak terlalu vokal dalam pembentukan ASEAN-IPR juga mengindikasikan bahwa institusi ini tidak dapat berjalan karena hanya didasari oleh preferensi personal satu elit saja.²³ Tak hanya itu, penelitian milik Novriest Uumbu Walangara Nau juga berpendapat bahwa ASEAN-IPR tidak efektif karena organisasi tersebut tidak pernah digunakan dalam kerangka penyelesaian konflik.²⁴

Penelitian ini pun menjadi menarik karena dalam penelitian ini penulis mencoba untuk meneliti sejauh mana peran ASEAN-IPR dalam membangun budaya perdamaian di Asia Tenggara dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Meskipun telah dibangun sejak tahun 2012, namun pencapaian yang didapatkan oleh ASEAN-IPR ini mulai terlihat pada tahun 2018, sejak diadakannya penandatanganan *Host Country Agreement* (HCA) oleh Pemerintah Republik Indonesia pada Desember 2018. Penandatanganan tersebut pun membuat ASEAN-IPR mulai berani untuk melangkah lebih jauh lagi karena status ASEAN-IPR sudah jelas tidak melanggar prinsip non-intervensi ASEAN dan juga telah melalui kesepakatan negara-negara anggota.²⁵ Tahun 2018 juga menjadi tahun pertama dimana situs web resmi ASEAN-IPR diluncurkan. Website ini diupayakan menjadi sarana edukasi dan komunikasi untuk memastikan semua pemangku kepentingan mengikuti dan mengetahui pekerjaan dan kegiatan insitut. Serta dirancang untuk menjadi platform yang berdedikasi, aktif dan menarik untuk penyebaran dan pertukaran informasi, berita dan sebagainya. Pada saat yang sama, ASEAN-IPR juga meluncurkan publikasi terbarunya yang berjudul Penguatan Konvergensi Aksi Kemanusiaan di ASEAN, yang merupakan rekomendasi dari simposium ASEAN-IPR tentang Hukum Humaniter Internasional yang diselenggarakan dengan Komite Palang Merah Internasional (ICRC).²⁶

Pergerakan ASEAN-IPR pada tahun 2018 ini pun disusul oleh rapat-rapat kerja untuk merumuskan program-program mereka. Karena bertujuan untuk meninjau kerjasama ASEAN serta memberikan kontribusi untuk perdamaian dan rekonsiliasi, ASEAN-IPR mulai mengimplementasikan tujuan tersebut dengan melaksanakan workshop bersama dengan *United Nations* (UN) dengan tema *ASEAN Perspectives in Conflict Management and Conflict Resolution in the Region* serta melakukan peluncuran *ASEAN Women for Peace Registry*

²³ Fadhila Irfansyah, “Insituti Internasional Sebagai Representasi Individu: Faktor Ketidakefektifan ASEAN Institute for Peace and Reconciliation Dalam Mekanisme Penyelesaian Konflik Di Asia Tenggara,” *Ayan* 8, no. 5 (2019): 55.

²⁴ Novriest Uumbu Walangara Nau and Jet Sahertian, “Efektivitas Pembentukan Asean Institute for Peace and Reconciliation Dalam Menangani Konflik Di Kawasan Asia Tenggara,” *Frequency of International Relations (FETRIAN)* 3, no. 1 (2021): 1–32, <https://doi.org/10.25077/fetrian.3.1.1-33.2021>. ‘Efektivitas Pembentukan Asean Institute for Peace and Reconciliation Dalam Menangani Konflik Di Kawasan Asia Tenggara’, *Frequency of International Relations (FETRIAN)*, 3.1 (2021), 1–32 <<https://doi.org/10.25077/fetrian.2021>>. 31-33.

²⁵ Pizaro Gozali Idrus, “AIPR Prioritaskan Studi Resolusi Konflik Sebagai Pegangan ASEAN,” *Anadolu Agency*, 2018, <https://www.aa.com.tr/id/headline-hari/aipr-prioritaskan-studi-resolusi-konflik-sebagai-pegangan-asean/1050216#>. 10-11.

²⁶ Ministry of Foreign Affairs of Indonesia, ‘Menlu Retno Kepada ASEAN Youth : Jadilah Agen Toleransi Dan Duta Perdamaian’, 2018, <<https://asean-aipr.org/fm-retno-to-asean-youth-be-the-agent-for-tolerance-and-ambassadors-for-peace/>>.1–2.

(AWPR) di Cebu, Filipina.²⁷ Tak hanya itu, ASEAN-IPR juga mengadakan konferensi Pemuda ASEAN-IPR dengan tema *Building Unity and Common Understanding in Countering Intolerance and Violent Extremism* yang bertujuan untuk melibatkan pemuda dalam upaya mewujudkan perdamaian dan rekonsiliasi di kawasan. Diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang bekerja sama dengan ASEAN-IPR dan Misi Republik Korea untuk ASEAN di Jakarta.²⁸ Hal ini pun menjadi awal dari penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai sejauh mana peran ASEAN-IPR tersebut dalam membangun budaya damai di Asia Tenggara.

TINJAUAN PUSTAKA

Pertama, yaitu penelitian dari Ayu Intan Parameswari, dengan judul **“ASEAN dan Peacebuilding di Regional Asia Tenggara.”**²⁹ Penelitian tersebut merupakan sebuah penelitian yang membahas terkait ASEAN sebagai sebuah organisasi regional di kawasan Asia Tenggara yang dianggap tidak memiliki peran yang begitu besar dalam keamanan regional dalam menciptakan *peacebuilding* di kawasan tersebut. Hal tersebut ditandai dengan prinsip-prinsip dan norma ASEAN seperti non-intervensi yang membuat ASEAN masih enggan untuk mencampuri konflik-konflik di kawasan. Hal ini jika dilihat dalam konteks teori konstruktivis, prinsip-prinsip yang dipakai tersebut sebenarnya telah cukup menjadi konsepsi tersendiri bagi berjalannya *peacebuilding*, dan ketika prinsip tersebut dapat membangun lingkungan yang kondusif, maka ASEAN dapat dikatakan telah memiliki konsep *peacebuilding*-nya sendiri.

Terdapat perbedaan yang terlihat cukup jelas antara penelitian ini dengan penelitian milik penulis, yakni dalam literatur ini ruang lingkup materi yang dibahas hanya berfokus pada ASEAN dan bagaimana pembangunan perdamaian di kawasan Asia Tenggara, sedangkan penelitian milik penulis fokus materinya lebih fokus kepada pembangunan budaya perdamaian di Asia Tenggara jika dilihat dari peran ASEAN-IPR. Namun pada dasarnya kesamaannya ialah kedua penelitian ini sama-sama membahas mengenai pembangunan perdamaian di Asia Tenggara. Penelitian ini pun dapat membantu penulis dalam memahami bagaimana kemudian konsep *peacebuilding* yang dibangun di kawasan tersebut dapat terwujud melalui prinsip-prinsip yang dimiliki oleh ASEAN itu sendiri, dan juga pembentukan *peacebuilding* tersebut mengarah kepada *peace impact assessment* yang mana hasil pembangunan di negara-negara anggota akan memberikan dampak pada meningkatnya perdamaian. Sehingga, penulis dapat berkaca dan memahami terkait pembangunan dalam perdamaian dalam melanjutkan penelitian yang dilakukan.

Kedua, yaitu penelitian dari Fadhila Irfansyah dengan judul **“Institusi Internasional Sebagai Representasi Individu : Faktor Ketidakefektifan ASEAN Institute for Peace and Reconciliation dalam Mekanisme Penyelesaian Konflik di Asia Tenggara.”**³⁰ Penelitian

²⁷ Ryan, Cooper, and Tauer, “ASEAN-IPR Annual Report 2018,” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2018, 12–26.

²⁸ ASEAN Secretariat, ‘Menlu Retno Resmikan Peluncuran Website & Publikasi ASEAN-IPR Di ASEAN’, 2018, <<https://asean-aipr.org/fm-retno-officiated-launch-of-asean-ipr-website-on-asean-day/>>. 1–2.

²⁹ Ayu Intan Parameswari. ‘penelitian’, 2016. 7-8.

³⁰ Fadhila Irfansyah, ‘Insitusi Internasional Sebagai Representasi Individu: Faktor Ketidakefektifan ASEAN

tersebut merupakan sebuah jurnal artikel yang menjelaskan terkait faktor di balik ketidakefektifan ASEAN-IPR sebagai mekanisme penyelesaian konflik di Asia Tenggara yang menggunakan perspektif idiosinkretisme, dengan preferensi personal penginisiasi ASEAN-IPR itu sendiri, yaitu bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Terdapat perbedaan yang cukup menonjol antara penelitian ini dengan penelitian milik penulis, yakni dalam literatur ini, ruang lingkup materi yang dibahas ialah terkait faktor ketidakefektifan ASEAN-IPR, sedangkan penelitian milik penulis fokus pada peran dari ASEAN-IPR itu sendiri di kawasan Asia Tenggara. Namun dibalik perbedaan tersebut, terdapat keterkaitan antara kedua penelitian ini yaitu sama-sama menyajikannya secara naratif. Kekurangan dari penelitian milik Fadhila Irfansyah ini ialah terlalu menjelaskan secara rinci terkait personal/ideosinkratisme dari seseorang sehingga poin dari ketidakefektifan organisasi tersebut dalam mekanisme penyelesaian konflik tidak begitu tersampaikan secara rinci dan jelas. Kemudian untuk kelebihanannya yakni penelitian ini memberikan pemaparan yang sangat baik dalam membahas terkait sejarah berdirinya ASEAN-IPR itu sendiri hingga kemudian organisasi tersebut dijadikan sebagai salah satu pilihan dalam menyelesaikan konflik. Namun demikian penelitian ini tetap memberikan manfaat dan pemahaman yang lebih untuk penulis dalam memahami ASEAN-IPR.

Ketiga, yaitu penelitian dari Novriest Umbu Walangara Nau dan Jet Sahertian dengan judul **“Efektivitas Pembentukan ASEAN Institute for Peace and Reconciliation Dalam Menangani Konflik di Kawasan Asia Tenggara.”**³¹ Penelitian tersebut merupakan sebuah jurnal artikel yang membahas terkait pembentukan organisasi ASEAN-IPR yang dinilai tidak efektif, karena organisasi ini tidak pernah digunakan dalam kerangka penyelesaian konflik. Hal ini dikarenakan adanya penerapan prinsip ASEAN Way sebagai kerangka penyelesaian konflik. Jurnal ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dimiliki penulis dalam hal pembahasan yang membahas terkait peran ASEAN-IPR di Asia Tenggara. Kedua penelitian ini juga sama-sama menyebutkan beberapa konflik yang terjadi di kawasan Asia Tenggara seperti konflik Myanmar, Laut Cina Selatan, dan lain sebagainya. Terlepas dari kesamaan tersebut, perbedaan penelitian ini dengan milik penulis dapat dilihat dari fokusnya yang membahas terkait ASEAN-IPR dalam menangani konflik di Asia Tenggara, sedangkan penelitian milik penulis fokus pada ASEAN-IPR dalam membangun budaya damai di Asia Tenggara. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori efektivitas rezim internasional, sedangkan penulis menggunakan konsep peranan organisasi internasional. Kelebihan dari penelitian ini ialah dalam menjelaskan terkait elaborasi dari teori efektivitas rezim tersebut dalam penyelesaian konflik di Asia Tenggara yang dipaparkan dengan sangat rinci. Kekurangan dari penelitian ini ialah bahasan terkait peran dari ASEAN-IPR dalam menangani konflik-konflik tersebut masih terkesan sedikit, sehingga perlu dijelaskan lebih rinci lagi agar dapat dilihat keefektifitasannya.

Institute for Peace and Reconciliation Dalam Mekanisme Penyelesaian Konflik Di Asia Tenggara’, *Ayan*, 8.5 (2019), 55.

³¹ Nau and Sahertian, “Efektivitas Pembentukan Asean Institute for Peace and Reconciliation Dalam Menangani Konflik Di Kawasan Asia Tenggara.”“Efektivitas Pembentukan Asean Institute for Peace and Reconciliation Dalam Menangani Konflik Di Kawasan Asia Tenggara’, *Frequency of International Relations (FETRIAN)*, 3.1 (2021), <<https://doi.org/10.25077/fetrian.3.1.1-33.2021>>. 1–32.

Keempat, yaitu penelitian dari Adhe Nuansa Wibisono dengan judul “**Analisis Profil Organisasi : ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR)**.”³² Penelitian tersebut merupakan sebuah artikel yang menganalisis mengenai profil dari ASEAN *Institute for Peace and Reconciliation* (ASEAN-IPR), dimana dalam artikel ini dikatakan oleh Marty Natalegawa, Menteri Luar Negeri Indonesia bahwa pembentukan ASEAN-IPR harus dilihat sebagai jalur masuk lain bagi keterlibatan dan partisipasi dari unsur non pemerintah dalam mekanisme ASEAN dan menjelaskan bahwa ASEAN-IPR akan meningkatkan keamanan regional dan membantu menemukan solusi damai bagi sengketa di antara negara-negara anggota ASEAN, dan menambahkan bahwa ASEAN-IPR tidak akan bertentangan dengan prinsip non-intervensi ASEAN. Artikel ini jika dibandingkan dengan penelitian penulis dapat dilihat bahwa kesamaannya ialah sama-sama membahas terkait ASEAN-IPR serta bagaimana sejarah berdirinya organisasi tersebut. Hal yang membedakannya ialah penelitian ini hanya fokus membahas mengenai profil ASEAN-IPR secara umum, seperti struktur pengurus dan fungsi kerja ASEAN-IPR serta tantangan dan peluang untuk ASEAN-IPR. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih membahas mengenai sejauh mana peran yang dilakukan oleh ASEAN-IPR itu sendiri dalam membangun budaya perdamaian di Asia Tenggara. Namun demikian penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis dalam mendapatkan pemahaman yang lebih terkait dengan ASEAN-IPR.

Kelima, yaitu penelitian dari Ipung Pramudya Setiawan dan Made Selly Dwi Suryanti dengan judul “**Keterlibatan ASEAN dalam Menangani Konflik Myanmar (Studi Kasus : Konflik Etnis Rohingya 2017-2019)**.”³³ Penelitian tersebut merupakan sebuah jurnal artikel yang menjelaskan terkait keterlibatan ASEAN dalam penanganan konflik Rohingya dikarenakan ASEAN memiliki tanggung jawab untuk melindungi negara-negara regionalnya. Kemudian dikatakan juga bahwa dalam upaya penyelesaian konflik tersebut, ASEAN selalu berpegang teguh pada hak asasi manusia. Terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian ini dengan penelitian milik penulis, yakni dalam jurnal artikel ini ruang lingkup materi yang dibahas lebih berfokus pada keterlibatan ASEAN dalam menangani salah satu konflik yang terjadi di Asia Tenggara yakni konflik Myanmar. Sedangkan ruang lingkup bahasan penelitian milik penulis ialah berfokus pada peran ASEAN-IPR dalam membangun budaya perdamaian di Asia Tenggara. Namun, dalam kedua penelitian ini sama-sama terdapat bahasan mengenai konflik Myanmar. Kelebihan dari penelitian ini yakni memberikan pemaparan yang sangat rinci terkait konflik etnis Rohingya yang terjadi di Myanmar dan bagaimana ASEAN terlibat dalam hal tersebut, yang mana ini menjadi pemahaman dan pengetahuan lebih yang didapatkan oleh penulis dalam melihat konflik Myanmar dalam perspektif ASEAN itu sendiri. Karena dalam penelitian penulis juga terdapat bahasan mengenai konflik-konflik yang terjadi di Asia Tenggara, yang mana salah satunya ialah konflik etnis Rohingya di Myanmar ini.

³² Adhe Nuansa Wibisono, “Analisis Profil Organisasi : ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR),” no. April (2014): 1–5.

³³ Ipung Pramudya Setiawan and Made Selly Dwi Suryanti, ‘Keterlibatan Asean Dalam Menangani Konflik Myanmar (Studi Kasus: Konflik Etnis Rohingya 2017 – 2019)’, *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, (2021), <<https://doi.org/10.22225/politicos.1.2.2021.83-97>>. 83–97.

KERANGKA PEMIKIRAN

Konsep Peranan Organisasi Internasional

Peranan merupakan seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang atau suatu struktur yang menduduki suatu posisi dalam system. Peranan memiliki sifat saling tergantung dan berhubungan dengan harapan-harapan yang tidak terbatas hanya pada aksi (*action*), tetapi juga termasuk harapan mengenai motivasi (*motivation*), kepercayaan (*beliefs*), perasaan (*feelings*), sikap (*attitudes*) dan nilai-nilai (*values*). Jadi, peran dapat dipahami sebagai fungsi yang dimainkan oleh aktor dalam suatu arena. Dalam penelitian ini, aktor yang dimaksudkan sebagai organisasi internasional ialah ASEAN-IPR.³⁴ Organisasi internasional sendiri didefinisikan sebagai pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yang lengkap dan jelas dalam melaksanakan fungsinya secara melembaga guna mencapai tujuan-tujuan yang telah disepakati bersama, baik pemerintah dengan pemerintah, maupun non-pemerintah dengan negara yang berbeda. Peran organisasi internasional dalam hubungan internasional telah diakui karena keberhasilannya dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi suatu negara, dan kehadiran dari organisasi internasional mencerminkan kebutuhan manusia untuk bekerjasama serta menjadi sarana untuk menangani masalah-masalah yang timbul melalui kerjasama tersebut.³⁵

Terdapat dua perbedaan mendasar dalam bentuk organisasi internasional, yaitu *International Governmental Organizations* (IGOs) dan *International Non-Governmental Organizations* (INGOs). IGO sendiri didefinisikan sebagai struktur institusi yang dibentuk oleh persetujuan antara dua atau lebih negara anggota untuk menghasilkan relasi politik yang regular. Organisasi internasional berfungsi sebagai mediasi, penjaga perdamaian, dan kebijakan umum. Dalam fungsi ini, organisasi internasional dijadikan sebagai organisasi yang ditaati oleh berbagai negara, baik dalam kebijakan memelihara perdamaian maupun sebagai penengah untuk negara-negara yang terlibat dalam suatu sengketa.³⁶

Kemudian menurut Clive Archer, peranan/fungsi organisasi internasional dibagi menjadi tiga kategori, yaitu : 1.) Sebagai suatu instrumen, yang mana organisasi internasional ini digunakan oleh beberapa negara anggota untuk mencapai tujuan tertentu; 2.) Sebagai arena, yang mana organisasi internasional merupakan tempat bertemunya anggota-anggota untuk membahas permasalahan yang dihadapi; 3.) Sebagai aktor independen, yang mana organisasi internasional dapat membuat

³⁴ Made Dwi Wahyuni et al., “Peranan Organisasi Internasional Dalam Menjalinkan Hubungan Kerjasama Internasional Antar Anggota” 3 (2023): 20–29.

³⁵ Pretince Hall, ‘International Government Organization (IGO) Menurut Hukum Internasional’, 1997., 1-7.

³⁶ Imam Mulyana and Irawati Handayani, “Peran Organisasi Regional Dalam Pemeliharaan Perdamaian Dan Keamanan Internasional,” 2011, 110.

keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi.³⁷

Beberapa IGOs dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan forum untuk debat atau negosiasi dalam menyelesaikan perselisihan. Sementara yang lainnya dikembangkan untuk melaksanakan kepentingan bersama dengan tujuan untuk melestarikan perdamaian melalui resolusi konflik dan menciptakan hubungan internasional yang lebih baik, untuk mempromosikan hak asasi manusia, perlindungan lingkungan, pembangunan sosial dan lain sebagainya. Terlihat dari peranan/fungsi dari organisasi internasional yang telah disebutkan sebelumnya, dengan jelas tertuju pada ASEAN yang menjadi salah satu wadah yang baik untuk memperjuangkan kepentingan negara-negara anggotanya. Dalam penelitian ini perlu dipahami terlebih dahulu bahwa ASEAN merupakan organisasi kerjasama regional yang berada dalam satu wadah asosiasi karena adanya kepentingan bersama. Kerja sama regional ini lebih bersifat kooperatif, dimana negara-negara ASEAN masih sepenuhnya memiliki kedaulatan ke dalam maupun ke luar. Kedaulatan tetap menjadi prinsip utama ASEAN dan merupakan norma dari norma-norma dasar lainnya. Sedangkan landasan utama kerja sama ini adalah musyawarah untuk saling membantu demi kepentingan bersama (*commoninterest*).³⁸

Peranan dan fungsi yang telah dijelaskan sebelumnya juga sejalan dengan ASEAN-IPR sebagai salah satu organisasi yang terbentuk di bawah organisasi ASEAN tersebut. ASEAN-IPR sendiri merupakan sebuah organisasi yang memiliki beberapa fungsi seperti melakukan penelitian dan menyusun praktik terbaik ASEAN dalam proses perdamaian dengan maksud meningkatkan mekanisme regional, membangun kapasitas dan pengetahuan tentang proses perdamaian untuk semua pemangku kepentingan, serta mengembangkan kelompok ahli untuk membantu ASEAN dalam manajemen konflik, memberikan rekomendasi kebijakan dan memfasilitasi negosiasi perdamaian. Penggunaan konsep peranan organisasi internasional ini kemudian akan membantu peneliti untuk menjawab sejauh mana peran ASEAN-IPR dalam membangun budaya perdamaian di Asia Tenggara.

Konsep *Culture of Peace*

Culture of peace atau budaya damai telah didefinisikan dalam sejumlah resolusi PBB dengan definisi yang berbeda-beda. Menurut definisi dari pendekatan yang diambil oleh dua resolusi penting PBB, yakni Program Aksi tentang Budaya Damai yang diadopsi pada tahun 1999; dan Resolusi PBB 1998 tentang budaya damai : budaya damai adalah pendekatan integral untuk mencegah kekerasan dan konflik kekerasan, dan juga alternatif dari budaya perang dan kekerasan berdasarkan pendidikan untuk perdamaian, promosi pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan, kesetaraan gender,

³⁷ Desak Anggun et al., “Peran Organisasi Internasional Dalam Perdamaian Internasional” 3, no. April (2023): 41–49.

³⁸ Ade Tiara Puteri Cornelesz, “Kedudukan Organisasi Internasional Sebagai Wadah Kerjasama Antar Negara Menurut Kajian Hukum Internasional,” *Lex Et Societatis* 6, no. 6 (2018): 21–29.

penghormatan terhadap hak asasi manusia, partisipasi demokratis, toleransi, arus bebas informasi dan pelucutan senjata. Delapan poin ini merupakan Program Aksi yang diadopsi oleh Majelis Umum.³⁹ Gagasan mengenai gerakan global untuk budaya damai berawal dari adanya keterlibatan Amerika Latin dengan *United Nations Educational Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) pada awal 1990-an, di mana mereka memahami bahwa budaya perdamaian memiliki suatu karakteristik dengan gerakan universal yang sedang dibangun.⁴⁰ Pada titik ini, budaya damai telah dianut oleh Majelis Umum PBB dan organisasi masyarakat sipil di seluruh dunia sebagai gerakan global untuk budaya damai. Selanjutnya, seperti yang tertera dalam program aksi yang diadopsi PBB pada tahun 1999, kemitraan dan berbagi informasi ditekankan. Kemitraan antara berbagai aktor harus didorong dan diperkuat dalam gerakan global untuk budaya perdamaian, dan dapat dipromosikan melalui berbagi informasi satu sama lain.⁴¹

Jika dilihat dari perspektif Johan Galtung, perdamaian didefinisikan dalam dua pengertian, yaitu : (1) perdamaian adalah ketiadaan atau pengurangan segala jenis kekerasan; dan (2) perdamaian adalah konflik kreatif tanpa kekerasan. Sehingga dapat dikatakan bahwa perdamaian “damai” merupakan suatu situasi atau kondisi dimana individu atau kelompok dalam suatu masyarakat tertentu merasa nyaman, aman dan damai. Budaya perdamaian memiliki tujuan untuk mengubah nilai, sikap, dan perilaku pada setiap individu yang mengarah pada budaya yang dibentuk oleh perdamaian, perang dan kekerasan.⁴² Kemudian dalam melaksanakan *Plan of Action* menuju budaya damai, Sidang Umum PBB ke-50 pada bulan November 1997, meminta Sekretaris Jenderal untuk bekerja sama dengan Direktur Jenderal UNESCO untuk menyampaikan laporan bersama yang isinya berupa perintah untuk mengumumkan rencana aksi tentang budaya damai kepada Majelis Umum. Selanjutnya, tugas penting untuk mengembangkan budaya damai adalah mencegah kekerasan yang sering ditimbulkan oleh proses identifikasi kelompok dalam beberapa konteks seperti fundamentalisme, separatisme etnis dan gerakan nasionalis yang muncul. Cara untuk mempromosikan dan mendukung budaya damai diantaranya ialah dengan membangun perkembangan budaya damai itu sendiri dan mengajarkan dan memperkuat nilai-nilai Transdensi Diri sebagai pengganti dari nilai-nilai peningkatan diri.⁴³

³⁹ Early History et al., “Global Movement for a Culture of Peace,” n.d., 3–5.

⁴⁰ Morton Deutsch and Peter T. Coleman, *Psychological Components of Sustainable Peace: An Introduction, Psychological Components of Sustainable Peace*, 2012, https://doi.org/10.1007/978-1-4614-3555-6_1. 7-9.

⁴¹ José Miguel Fernández-Dols, Alejandra Hurtado-de-Mendoza, and Isabel Jiménez-de-Lucas, ‘Culture of Peace: An Alternative Definition and Its Measurement’, *Peace and Conflict*, 10. (2004), <https://doi.org/10.1207/s15327949pac1002_3>. 117–124.

⁴² M. N. R Hadjam and W Widhiarso, “Budaya Damai Anti Kekerasan (Peace and Anti Violence),” *Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Umum*, 2003, 69.

⁴³ Karolina Baszarkiewicz Douglas P. Fry, Bruce D. Bonta, *Handbook on Building Cultures of Peace, Handbook on Building Cultures of Peace*, 2009 <<https://doi.org/10.1007/978-0-387-09575-2>>.2-4.

Jika dilihat dari perspektif Johan Galtung, terdapat tiga langkah dalam Metode Transendental untuk transformasi konflik melalui cara damai yang umumnya dikenal sebagai Metode Transendental atau Galtungian, yaitu :

- 1.) Membangun kepercayaan. Mediator harus lebih dulu memahami tujuan, jaringan dan pihak-pihak yang berkonflik, yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung. Hal ini dapat dilakukan melalui dialog pribadi dengan beberapa pihak yang terlibat dalam konflik, serta pihak-pihak yang mungkin sekiranya tidak disukai mediator hingga mencoba memahami tujuan mereka dan mendapatkan kepercayaan.
- 2.) Membangun hubungan timbal balik, dimana mediator harus meluangkan waktu untuk membedakan antara tujuan legal dan ilegal serta kebutuhan dari kedua belah pihak yang berkonflik. Mediator tentu akan berperan penting dalam memperkuat hubungan timbal balik mereka.
- 3.) Mediator harus berusaha untuk menjembatani antara tujuan awal tetapi juga harus tetap membandingkan semua pihak melalui solusi yang diinginkan dan dapat diterima untuk masa depan yang berkelanjutan, serta menunjukkan kreativitas melalui empati dan non-kekerasan.

Metode tersebut tidak hanya berfokus pengetahuan dan penilaian dalam proses hukum tradisional, tetapi juga menciptakan realitas baru, inovatif yang berguna dan dapat diterima oleh semua pihak yang berkonflik, yang mana hal ini harus diterapkan di semua tingkatan baik keluarga, komunitas dan lembaga.⁴⁴

Istilah budaya damai lebih dari sekedar slogan, namun merupakan sebuah konsep penting dari strategi perdamaian yang berkelanjutan dan dengan demikian juga sangat diperlukan dalam pendidikan perdamaian kontemporer. Perdamaian harus lebih dari sekedar tidak adanya perang yang harus mencakup keadilan sosial, hubungan sosial yang damai dengan menghilangkan akar permasalahan, dan jika tidak bisa menghilangkan semua jenis kekerasan namun setidaknya bentuk-bentuk kekerasan yang terorganisir secara politik.⁴⁵ Konsep UNESCO memahami budaya sebagai cara berperilaku setiap hari, berperilaku damai, selalu siap berdialog dan memahami, serta mempertahankan keyakinan dan opini tanpa adanya kekerasan. Di sisi lain, budaya damai dan non-kekerasan juga merupakan suatu komitmen untuk perdamaian, mediasi, pencegahan dan penyelesaian konflik, pendidikan perdamaian, pendidikan non kekerasan, toleransi, saling menerima, saling menghormati, dialog antar budaya dan antar agama serta rekonsiliasi.⁴⁶

Jika diperhatikan lagi, semua gagasan mengenai budaya damai tersebut identik dengan kondisi untuk meniadakan kekerasan. Sehingga hal tersebut pun direfleksikan oleh peran ASEAN-IPR dengan berbagai upayanya dalam membangun budaya perdamaian tersebut, melalui pelatihan-pelatihan, *working paper series*, *group*

⁴⁴ Federico Mayor, "Culture of Peace," 2000. Hal. 1-3.

⁴⁵ Diane G. Tillman, "Educating for a Culture of Peace in Refugee Camps," *Childhood Education* 77, no. 6 (2001): 375-78, <https://doi.org/10.1080/00094056.2001.10521673>.

⁴⁶ Ainul Mardhiah, "Proses Membangun Budaya Damai Melalui Pendidikan Islam", 3.1 (2018), 10-27 <<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>>.

discussion, dan lain sebagainya. Selain itu, ASEAN-IPR mengimplementasikan tiga langkah dalam metode transdental yang disebutkan sebelumnya dengan beberapa fungsi yang dimiliki oleh ASEAN-IPR. Pertama ialah berusaha untuk membangun kepercayaan, dapat dilihat dengan adanya kesepakatan dari negara-negara anggota ASEAN untuk mendirikan ASEAN-IPR tersebut sebagai wadah untuk memfasilitasi negosiasi perdamaian. Kemudian membangun hubungan timbal balik dilakukan oleh ASEAN-IPR dengan melakukan pertemuan-pertemuan dengan negara anggota ASEAN untuk memaksimalkan usaha damai melalui berbagai diskusi. Selanjutnya dalam usaha untuk menjembatani tujuan semua pihak melalui solusi yang diinginkan, dilakukan oleh ASEAN-IPR dengan memberikan rekomendasi kebijakan sebagai usaha dalam membangun perdamaian.

Untuk membangun perdamaian abadi, para pihak yang bertikai harus menganalisis penyebab konflik struktural serta memulai perubahan struktur sosial.⁴⁷ Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, berbagai konflik kerap terjadi di kawasan Asia Tenggara, dimulai dari kasus sengketa wilayah, gerakan separatisme, hingga konflik etnis yang berujung adanya kekerasan dalam penyelesaian beberapa konflik tersebut. Sehingga konsep budaya damai ini merupakan konsep yang tepat dalam membantu penulis untuk berusaha menjelaskan sejauh mana peran dari institusi yang diciptakan oleh ASEAN yakni ASEAN-IPR dalam membangun budaya perdamaian di kawasan Asia Tenggara tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Perdamaian dan Konflik di Asia Tenggara

Kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan regional yang cenderung dikatakan sebagai kawasan paling dinamis di dunia dan mempunyai potensi ekonomi dan konflik yang cukup besar. Asia Tenggara juga adalah salah satu dari sekian banyak kawasan yang memiliki banyak konflik dan permasalahan, yang mana kebanyakan dari konflik tersebut berupa konflik laten antar negara ataupun konflik internal di dalam negara itu sendiri. Sebagai organisasi regional, ASEAN mempunyai peran yang cukup unik dalam mengolah kedua potensi yang ada di kawasan ini. Kepala negara dari enam anggota ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Brunei, Singapura dan Thailand menegaskan kembali tekad mereka untuk menciptakan sebuah zona perdamaian, kebebasan, dan netralitas atau yang lebih akrab disebut *Zone of Peace, Freedom and Neutrality* (ZOPFAN) di kawasan tersebut yang dituang dalam Deklarasi Manila yang ditandatangani pada tanggal 15 Desember 1987.⁴⁸

Terbentuknya ASEAN serta perannya melalui diplomasi di kalangan elit kemudian mampu untuk menghadirkan perdamaian. Adanya perdamaian pun tidak menjamin bahwa intensitas dari konflik antar negara-negara anggotanya menghilang. Terlepas dari keragaman politik, agama dan etnis yang dimiliki oleh warga negara-negara di Asia Tenggara, bukan berarti akan lebih rentan terhadap konflik antar negara

⁴⁷ Aloysius Jondar and others, 'Johan Galtung ' S Concept Of Peace Culture And Its Implementation In Indonesia', 6.2 (2022), 230–253.

⁴⁸ Dewi Triwahyuni, "Signifikansi Kawasan Asia Tenggara Dalam Kepentingan Amerika Serikat," *Majalah Ilmiah UNIKOM* 9, no. 1 (2011): 33–44, https://jurnal.unikom.ac.id/_s/data/jurnal/v09-n01/volume-91-artikel-4.pdf/pdf/volume-91-artikel-4.pdf.

atau *interstate* daripada wilayah lain di dunia. Sebaliknya, jika sesuatu yang terutama berkaitan dengan konflik antarnegara, anggota negara-negara ASEAN berhak untuk mengklaim bahwa norma non intervensi pada isu-isu di dalam negeri sebagian besar telah menyelamatkan kawasan tersebut dari ancaman teror dari konflik bersenjata antarnegara.⁴⁹

Sejarah panjang juga telah mencatat bahwa pasca terbentuknya ASEAN pada tahun 1967, organisasi ini belum mampu untuk mengurangi konflik yang terjadi di regional Asia Tenggara. Walaupun dikatakan berhasil meniadakan perang di antara negara-negara anggotanya, ASEAN tetap belum mampu meniadakan sengketa-sengketa perbatasan yang masih sering terjadi di antara mereka, serta belum mampu meredam konflik-konflik intra negara yang terus tumbuh semenjak berakhirnya Perang Dingin. Hal tersebut bisa dilihat dari beberapa konflik yang masih terus berlanjut, seperti halnya konflik persengketaan antara Thailand dan Kamboja yang memperebutkan wilayah tempat Candi Preah Vihear berada, di mana konflik tersebut melibatkan insiden pertempuran antar militer kedua negara tersebut. Selain itu, konflik sengketa lainnya ialah konflik Laut Cina Selatan yang diklaim oleh China, Taiwan, dan beberapa negara ASEAN seperti Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Brunei, yang mana setiap negara memiliki pandangannya masing-masing yang berbeda terkait kepemilikan atas kawasan tersebut. Konflik LCS ini juga merupakan salah satu konflik yang berlangsung cukup lama dan terus berlanjut tanpa menemui penyelesaian hingga saat ini.⁵⁰

Upaya ASEAN dalam Membangun Perdamaian di Asia Tenggara

Asia Tenggara telah menjadi salah satu kawasan yang damai dan stabil di dunia, yang mana ini merupakan rekor yang berhasil dipegangnya dalam lingkungan keamanan pasca Perang Dingin. ASEAN dipandang sebagai organisasi yang memiliki kekuatan positif untuk perubahan damai karena kemampuannya mengelola hubungan antarnegara di kawasan. ASEAN juga dipuji atas kepemimpinannya dalam membangun beberapa lembaga multilateral yang menyatukan sebagian besar negara di kawasan Indo-Pasifik yang lebih luas untuk mengatasi berbagai tantangan keamanan, politik, dan ekonomi. Lembaga-lembaga ini diantaranya termasuk *ASEAN Regional Forum (ARF)*, *ASEAN Plus Three (APT)*, *East Asia Summit (EAS)*, serta kerangka atau pengaturan keamanan seperti *ASEAN Defense Ministers' Meeting (ADMM)* dan *ADMM Plus*.

ASEAN berupaya untuk mendorong perdamaian di kawasan Asia melalui perdamaian di kawasan ASEAN itu sendiri, meskipun tingkat keaktifan negara-negara anggota ASEAN dalam operasi perdamaian baik yang dilakukan di kawasan Asia maupun di tempat lain masih tergolong rendah.⁵¹ Hal tersebut dapat dilihat dari negara-negara anggota ASEAN yang cenderung lebih memilih cara bilateral dalam menyelesaikan masalah, dan mempertimbangkan kekuatan militer dari negara-negara anggota ASEAN yang terbilang tidak terlalu kuat. Menurut beberapa ahli, ASEAN

⁴⁹ Dewa Gede et al., "Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk Di Dalam Tubuh ASEAN," *Perspektif* 17, no. 3 (2012): 150–61.

⁵⁰ R. Wildan Pratama Indra Kusumah, "Jalan Damai Menuju Keamanan Regional: Pendekatan Asean Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Laut China Selatan," *FACTUM: Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah* 7, no. 2 (2018): 255–68, <https://doi.org/10.17509/factum.v7i2.15610>.

⁵¹ Ayu Intan Prameswari, "ASEAN Dan Peacebuilding Di Regional Asia Tenggara," 2016, 10–12.

dianggap sebagai sebuah organisasi yang “unik”, terlepas dari segala tujuan dan cita-cita yang dimiliki ASEAN mengenai pembangunan kawasan Asia Tenggara kedepannya. Dikatakan unik karena organisasi ini memiliki beberapa faktor yang berbeda dengan organisasi regional lainnya. Salah satu contohnya ialah ASEAN yang menganut prinsip non-intervensi, yakni sebuah prinsip untuk tidak ikut campur dalam permasalahan domestik maupun permasalahan bilateral yang terjadi diantara negara-negara anggota ASEAN.⁵²

Meskipun telah membangun komunitas 3 pilar ASEAN yang merupakan lintasan positif bagi regionalisme Asia Tenggara, kebutuhan untuk menghadapi tantangan domestik dari konflik internal yang berkepanjangan tetaplah penting. Beberapa konflik internal yang terjadi di Asia Tenggara ini dijadikan sebagai pengingat terus-menerus akan perlunya mengadopsi pendekatan keamanan yang komprehensif jika ingin mempertahankan perdamaian dan keamanan. Berbagai konflik tersebut bahkan telah menjadi sumber keprihatinan di antara para pemimpin dan pejabat ASEAN bahwa tidak menutup kemungkinan konflik-konflik tersebut cepat meningkat dan menyebar ke negara-negara tetangga yang dapat mengakibatkan ancaman terhadap keamanan kawasan.

Keberadaan konflik antara negara-negara dalam kawasan tersebut membuat kehadiran ASEAN sebagai organisasi regional menjadi relevan. Sebagai organisasi yang membawahi negara-negara kawasan, ASEAN perlu mengambil berbagai langkah nyata untuk menangani konflik karena kemunculan konflik-konflik antar aktor di kawasan terbilang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan kawasan. Dalam mengatasi persoalan-persoalan di kawasan, salah satu upaya yang dapat dilakukan ASEAN ialah dengan membentuk *ASEAN Institute for Peace and Reconciliation* pada tanggal 8 Mei 2011.

Peran ASEAN-IPR dalam Membangun Perdamaian di Asia Tenggara

1. *ASEAN Institute for Peace and Reconciliation* (ASEAN-IPR)

Minimnya kepercayaan dan kedamaian mengakibatkan sebuah konflik terjadi, dan konflik akan menjadi semakin besar karena perbedaan yang semakin kompleks serta tidak adanya suatu lembaga ataupun instansi yang menangani konflik tersebut menjadi alasan ASEAN membentuk institusi riset perdamaian, yakni *ASEAN Institute for Peace and Reconciliation* (ASEAN-IPR). Institut ini didirikan sebagai garis aksi di bawah ketentuan B.2.2 dari Cetak Biru APSC (2010-2015), yang bertujuan untuk kegiatan penelitian tentang perdamaian, manajemen konflik dan resolusi konflik.

ASEAN-IPR didirikan sebagai garis aksi di bawah ketentuan B.2.2 dari *ASEAN Political-Security Community Blueprint* (2010-2015) Sebagai tindak lanjut dari *ASEAN Leaders Joint Statement on the Establishment of an ASEAN Institute for Peace and Reconciliation* yang bertujuan untuk memperkuat kegiatan penelitian tentang perdamaian, manajemen konflik dan resolusi konflik. Pernyataan bersama tentang

⁵² Yusuf, Rifqi Itsnaini, ‘Asean’s Regional Mechanism; Asean Dan Perdamaian Kawasan Melalui Security Community’, *Jurnal Sosial Politik Peradaban*, 1.2 (2020), 17–23

Pembentukan Institut Perdamaian dan Rekonsiliasi ASEAN ini diadopsi oleh para pemimpin ASEAN pada acara 18th KTT ASEAN, tepatnya pada 8 Mei 2011.

Beberapa fungsi yang dimiliki oleh ASEAN-IPR, yaitu : 1.) Riset, yang mana ASEAN-IPR melakukan penelitian dan menyusun pengalaman serta praktik terbaik ASEAN (termasuk pengarusutamaan gender) tentang proses perdamaian, dengan maksud untuk memberikan rekomendasi yang tepat kepada Badan-Badan ASEAN, dan meningkatkan mekanisme regional; 2.) Pengembangan Kapasitas, dimana ASEAN-IPR berusaha untuk membangun kapasitas dan pengetahuan tentang proses perdamaian untuk semua pemangku kepentingan; 3.) Kumpulan Pakar/Ahli, ASEAN-IPR mengembangkan kumpulan ahli untuk membantu ASEAN (pemerintah dan/atau Badan) dalam manajemen konflik, memberikan rekomendasi kebijakan, serta memfasilitasi negosiasi perdamaian; 4.) Jaringan/Pusat Pengetahuan, yang berfungsi sebagai pusat pengetahuan dengan menjalin hubungan/jaringan dengan institusi dan organisasi terkait di AMS, serta kawasan lain, dan di tingkat internasional dengan tujuan serupa yang ditujukan untuk mempromosikan budaya damai; 5.) Diseminasi Informasi, yang mana ASEAN-IPR menyebarluaskan praktik terbaik, pelajaran yang dipetik dan informasi yang relevan kepada AMS, pemangku kepentingan terkait lainnya, serta masyarakat umum.⁵³

ASEAN-IPR Dalam Isu Perdamaian di Asia Tenggara

Seperti yang telah dipaparkan pada bahasan-bahasan sebelumnya terkait konflik di kawasan Asia Tenggara, kawasan ini mengalami beragam jenis konflik di mana konflik yang terjadi tidak hanya melibatkan aktor negara saja tetapi juga aktor non negara dengan berbagai permasalahan yang berbeda-beda. Permasalahan yang paling sering terjadi ialah perbatasan wilayah dalam suatu kawasan yang terdiri dari banyak negara, terlebih lagi saat negara-negara tersebut merupakan bekas koloni.⁵⁴ Hal ini menandakan bahwa konflik-konflik tersebut biasanya disebabkan oleh adanya kepentingan yang berlawanan ataupun bertentangan, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, agama, maupun kebudayaan antar aktor di dalam kawasan. Sehingga pada akhirnya konflik tersebut mengakibatkan terganggunya perdamaian.

Dalam isu-isu perdamaian di Asia Tenggara, ASEAN-IPR berupaya untuk terlibat walaupun tidak secara langsung turun ke lapangan, melalui *working paper series on peace and conflict resolution*. Beberapa *working paper series* yang dipublish di web ASEAN-IPR tersebut membahas terkait isu-isu perdamaian yang terjadi di Asia Tenggara. Diantaranya ialah "*The Impact of Myanmar's Nationwide Ceasefire Agreement on the Peace-Building Environment*" yang ditulis oleh Peggy Brett. Ini merupakan kasus perjanjian gencatan senjata nasional Myanmar yang berdampak terhadap lingkungan pembangunan perdamaian. Selanjutnya yakni "*Cohesion in the Time of Conflict : An Analysis of Social Cohesion in the Context of Ethnic Armed Conflict in Myanmar's Rakhine State*". Efektivitas dari inisiatif kohesi sosial dalam menyelesaikan ketegangan antarkomunal di negara bagian Rakhine sejauh ini masih terbatas.

⁵³ Adhe Nuansa Wibisono, 'Analisis Profil Organisasi : ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (ASEAN-IPR)', April, 2014, 1–5.

⁵⁴ Khanisa Krisman, "This Review Consists Ofviews on ASEAN Development Related to the Three Pillars OfASEAN Community and the Problem in Those Three Background Issues Politic and Security Economy and Socio Culture Looking Forward The ASEAN Community in 2015 the Review Tries T," 2015, 159–67.

ASEAN-IPR juga mempublish terkait isu perdamaian di Ujung Selatan Thailand yang berjudul “*Local Women and Peacebuilding in Thailand’s Deep South : Perspectives from the Peace Survey*”. Ujung Selatan Thailand yang terdiri dari Pattani, Yala, Narathiwat, dan empat distrik di Provinsi Songkla telah mengalami konflik politik yang keras dari tahun 2004 hingga tahun 2020, yang mengakibatkan 20.692 korban jiwa. Beberapa peran yang telah dilaksanakan ASEAN-IPR tersebut telah sejalan dengan peranan organisasi internasional yang berfungsi sebagai penjaga perdamaian. Dalam fungsi ini, organisasi internasional dijadikan sebagai organisasi yang ditaati oleh berbagai negara yang mana dalam hal ini ialah negara-negara anggota ASEAN-IPR itu sendiri dalam kebijakan memelihara perdamaian.

ASEAN-IPR Dalam Membangun Budaya Perdamaian di Asia Tenggara

Beberapa konflik yang terjadi di Asia Tenggara yang belum menemukan titik terang bahkan sampai saat ini menunjukkan bahwa pembangunan perdamaian di kawasan ini bisa dikatakan masih rendah. Belum adanya kesadaran antar negara anggota di kawasan akan pentingnya budaya damai dan dengan kepentingan masing-masing yang berbeda menyebabkan konflik terus berlanjut. Berangkat dari hal ini maka pembangunan budaya damai sangat diperlukan di Asia Tenggara.

Budaya damai pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kesadaran baru dan mengubah masyarakat menjadi damai melalui komprehensif. Membangun budaya damai bukan berarti menghilangkan kekerasan, namun lebih ke mempromosikan nilai-nilai sosial yang dapat mengurangi eskalasi kekerasan. ASEAN-IPR sebagai salah satu organisasi yang memiliki mandat dalam melakukan perdamaian dan rekonsiliasi pun memulai upayanya dalam membangun budaya damai dengan cara menggunakan tiga langkah dalam Metode Transdental untuk transformasi konflik melalui cara damai yang diprakarasi oleh Johan Galtung.⁵⁵

Tiga langkah tersebut ialah membangun kepercayaan, membangun hubungan timbal balik, dan berlaku adil dengan semua pihak yang terlibat. ASEAN-IPR sebagai salah satu organisasi di bawah ASEAN merefleksikan tiga langkah dalam metode transdental tersebut melalui beberapa fungsi yang dimiliki oleh ASEAN-IPR itu sendiri. Pertama ialah berusaha untuk membangun kepercayaan, dapat dilihat dengan adanya kesepakatan dari negara-negara anggota ASEAN untuk mendirikan ASEAN-IPR tersebut sebagai wadah untuk memfasilitasi negosiasi perdamaian.

Kemudian membangun hubungan timbal balik dilakukan oleh ASEAN-IPR dengan melakukan pertemuan-pertemuan dengan negara anggota ASEAN untuk memaksimalkan usaha damai melalui berbagai diskusi terkait perdamaian dan rekonsiliasi. Diskusi yang dilakukan ialah dengan melaksanakan *Discussion Series* setiap tahunnya dengan tema yang berbeda-beda. Hal tersebut kemudian akan membuat hubungan antarnegara, maupun hubungan antara pemangku-pemangku kepentingan dari setiap negara menjadi semakin erat. Selanjutnya dalam usaha untuk menjembatani tujuan semua pihak melalui solusi yang diinginkan, ASEAN-IPR

⁵⁵ Amin Mamma Gena and Kedir Ismael Jarra, “An Appraisal of the Practice of Indigenous Conflict Resolution Mechanisms in Building a Culture of Peace in Bale Zones, Oromia National Regional State, Ethiopia,” *Heliyon* 9, no. 4 (2023): e14970, <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e14970>.

merealisasikan hal tersebut dengan memberikan rekomendasi kebijakan sebagai usaha dalam membangun perdamaian.

Membangun budaya damai di Asia Tenggara pada akhirnya dapat didukung oleh ASEAN-IPR melalui berbagai upayanya yang diantaranya mampu memberikan rekomendasi kebijakan, tempat untuk bernegosiasi, bahkan juga mampu menyediakan wadah untuk melakukan *research* terkait perdamaian dan rekonsiliasi, yang mana hasil dari berbagai pertemuan penelitian yang dilakukan tersebut nantinya akan mampu memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih luas lagi, baik kepada masyarakat maupun kepada pemangku-pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan untuk membangun perdamaian di Asia Tenggara.

Dalam merefleksikan hal tersebut, upaya yang dilakukan oleh ASEAN-IPR sejauh ini dalam upaya membangun budaya perdamaian di Asia Tenggara bisa dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ASEAN-IPR pada setiap tahunnya, yang terhitung dari tahun 2018-2022. Upaya ASEAN-IPR tersebut dapat dilihat dari usahanya dalam melakukan pelatihan untuk mediasi dan rekonsiliasi, diantaranya seperti terlibatnya penasihat proses perdamaian untuk Presiden, Jesus Gestuvie Dureza yang andil secara langsung dalam proses perdamaian dalam konflik yang terjadi di Marawi, Filipina pada tahun 2017 silam.

Selanjutnya pada pertengahan tahun 2019, ASEAN-IPR melakukan kunjungan studi tentang “Fasilitasi Perdamaian dan Rekonsiliasi” di Swiss yang diprakarsai oleh *Federal Department of Foreign Affairs* (FDFA). Delegasi dari ASEAN-IPR juga memiliki pertukaran yang bermanfaat dengan *Swiss Peace*, yaitu tentang konseptualisasi penelitian dan peningkatan kapasitas dalam proses perdamaian, dan juga peran sistem pendukung mediasi. ASEAN-IPR juga berbagi pelajaran dari fasilitasi proses perdamaian di Mindanao 1993-1996 dalam hasil proyek riset ASEAN-IPR tentang Pembelajaran dari Proses Penyelesaian Konflik antara *Government of Philipina* (GRP) dan *Moro National Liberation Front* (MNLF) yang dimediasi oleh Indonesia. Proyek penelitian ini dipelopori oleh *Perwakilan Indonesia untuk ASEAN-IPR Governing Council*, H.E Artauli Tobing, yang bertujuan untuk menanamkan kebiasaan berdialog dan menyelesaikan sengketa secara damai di ASEAN.

ASEAN-IPR kembali melakukan upaya rekonsiliasi dan perdamaian melalui peluncuran buku riset ASEAN-IPR “*Aceh Case : Peacebuilding and Post Tsunami Recovery*”. Tujuan utama riset ini telah berhasil dicapai untuk menemukan peran aktor pasca-kemanusiaan dengan bantuan lebih lanjut mereka dalam pembangunan perdamaian. Publikasi ini pun menunjukkan bagaimana Aceh ialah salah satu daerah yang menerapkan perdamaian positif karena mereka memiliki sikap, institusi dan struktur yang menciptakan dan mempertahankan masyarakat yang damai. ASEAN-IPR juga melaksanakan dialog perdamaian dan multilateralisme mengenai pemuda sebagai agen perubahan masa depan, mengadakan seri pelatihan dengan tema pengarusutamaan perdamaian dan rekonsiliasi di Asia Tenggara yang dilaksanakan di Vientiane, Laos, dan juga melaksanakan Workshop dengan UN yang membahas terkait perspektif ASEAN dalam pengelolaan dan penyelesaian konflik di kawasan, yang dilaksanakan di Jakarta.

Upaya ASEAN-IPR selebihnya dituangkan dalam program rutin yang dilaksanakan yaitu melakukan suatu *Focus Group Discussion* (FGD) atau biasa disebut *Discussion*

Series mengenai perdamaian dan rekonsiliasi, dengan tema yang berbeda-beda. Selain mengadakan diskusi-diskusi terkait perdamaian, ASEAN-IPR juga mengadakan pameran perdamaian ASEAN-IPR di Phnom Penh, Kamboja. ASEAN-IPR juga berupaya untuk terlibat dalam isu-isu perdamaian di Asia Tenggara, meskipun secara tidak langsung turun ke lapangan, melalui publishing *working paper series on peace and conflict resolution* di web resmi ASEAN-IPR.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa peran ASEAN-IPR sebagai salah satu organisasi internasional dibawah naungan ASEAN yang fokus pada upaya perdamaian dan rekonsiliasi telah melaksanakan perannya dalam membangun budaya perdamaian di Asia Tenggara dengan baik. Meskipun peran yang dilakukan ASEAN-IPR terbilang belum optimal karena keterbatasan kuasa yang dimilikinya serta karena adanya prinsip non-intervensi yang dianut oleh ASEAN, namun ASEAN-IPR berusaha untuk membangun budaya perdamaian tersebut melalui berbagai upaya. Upaya-upaya yang dilakukan oleh ASEAN-IPR dimulai dengan melakukan pelatihan, diskusi, seminar dan berbagai kegiatan lainnya dalam isu perdamaian dan rekonsiliasi. Berbagai macam konflik yang terjadi di Asia Tenggara berjalan begitu cepat, menjadikan ASEAN-IPR sebagai organisasi yang dimandatkan untuk menyediakan platform pertukaran praktik-praktik terbaik regional dalam perdamaian dan rekonsiliasi agar berupaya lebih maksimal lagi dalam membangun budaya perdamaian di Asia Tenggara. Membangun budaya damai di Asia Tenggara pada akhirnya dapat didukung oleh ASEAN-IPR melalui berbagai upayanya yang diantaranya mampu memberikan rekomendasi kebijakan, tempat untuk bernegosiasi, bahkan juga mampu menyediakan wadah untuk melakukan *research* terkait perdamaian dan rekonsiliasi, yang mana hasil dari berbagai pertemuan penelitian yang dilakukan tersebut nantinya akan mampu memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih luas lagi, baik kepada masyarakat maupun kepada pemangku-pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan untuk membangun perdamaian di Asia Tenggara.

REFERENSI

Ade Tiara Puteri Cornelesz. "Kedudukan Organisasi Internasional Sebagai Wadah Kerjasama Antar Negara Menurut Kajian Hukum Internasional." *Lex Et Societatis* 6, no. 6 (2018): 21–29.

Adhe Nuansa Wibisono. "Analisis Profil Organisasi : ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR)," no. April (2014): 1–5.

Anggun, Desak, Amorrolin Monica, Putu Arya Suarnata, Universitas Pendidikan Ganesha, Kantor Kementerian, and Agama Kabupaten. "Peran Organisasi Internasional Dalam Perdamaian Internasional" 3, no. April (2023): 41–49.

Antuli, Rezky Ramadhan, Dudy Heryadi, and Teuku Rezasyah. "Analisis Peran Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Thailand Dan Kamboja Melalui Pendekatan National Role Conception." *Jupis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 11, no. 2 (2019): 448. <https://doi.org/10.24114/jupis.v11i2.14131>.

- ASEAN Secretariat. *ASEAN Political-Security Community Blueprint 2025*, 2016.
- . “Menlu Retno Resmikan Peluncuran Website & Publikasi ASEAN-IPR Di ASEAN,” 2018, 1–2. <https://asean-aipr.org/fm-retno-officiated-launch-of-asean-ipr-website-on-asean-day/>.
- AYU INTAN PARAMESWARI. “ASEAN Dan Peacebuilding Di Regional Asia Tenggara,” 2016, 10–12.
- Deutsch, Morton, and Peter T. Coleman. *Psychological Components of Sustainable Peace: An Introduction. Psychological Components of Sustainable Peace*, 2012. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-3555-6_1.
- Douglas P. Fry, Bruce D. Bonta, and Karolina Baszarkiewicz. *Handbook on Building Cultures of Peace. Handbook on Building Cultures of Peace*, 2009. <https://doi.org/10.1007/978-0-387-09575-2>.
- Eivan Prabowo, Muchsin Idris, Soekotjo Hardiwinoto. “PERAN ASEAN POLITICAL-SECURITY COMMUNITY DI DALAM UPAYA PENCEGAHAN TIMBULNYA KONFLIK BERSENJATA DI KAWASAN ASIA DAN ASIA TENGGARA.” *DIPONEGORO LAW REVIEW* 5 (2016): 1–15.
- Erizon Indra. “Kepatuhan Negara-Negara ASEAN Untuk Tidak Campur Tangan Dalam Menangani Persekusi Etnis Rohingya Di Myanmar.” *Journal of Controlled Release* 11, no. 2 (2018): 430–39.
- Fadhila Irfansyah. “Insitusi Internasional Sebagai Representasi Individu: Faktor Ketidakefektifan ASEAN Institute for Peace and Reconciliation Dalam Mekanisme Penyelesaian Konflik Di Asia Tenggara.” *Ayaz* 8, no. 5 (2019): 55.
- Farida, Elfia. “Penyelesaian Sengketa Perbatasan Antara Thailand Dan Kamboja Melalui Mekanisme Asean.” *Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, 43, no. 1 (2014): 57–66.
- Fernández-Dols, José Miguel, Alejandra Hurtado-de-Mendoza, and Isabel Jiménez-de-Lucas. “Culture of Peace: An Alternative Definition and Its Measurement.” *Peace and Conflict* 10, no. 2 (2004): 117–24. https://doi.org/10.1207/s15327949pac1002_3.
- Gde, Luh, Citra Sundari Laksmi, Dewa Gede, Sudika Mangku, Ni Putu, and Rai Yuliantini. “Peran Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Internasional Di Laut Cina Selatan.” *Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2022): 225.
- Gede, Dewa, Sudika Mangku, Universitas Pendidikan, and Ganesha Singaraja. “Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk Di Dalam Tubuh ASEAN.” *Perspektif* 17, no. 3 (2012): 150–61.
- Gena, Amin Mamma, and Kediri Ismael Jarra. “An Appraisal of the Practice of Indigenous Conflict Resolution Mechanisms in Building a Culture of Peace in Bale Zones, Oromia National Regional State, Ethiopia.” *Heliyon* 9, no. 4 (2023): e14970. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e14970>.

Gonda Yumitro. "PROSIDING KONVENAS AIHII VI Mataram, 24 – 28 November 2015," no. November (2015): 24–28.

Hadjam, M. N. R, and W Widhiarso. "Budaya Damai Anti Kekerasan (Peace and Anti Violence)." *Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Umum*, 2003, 69.

Hall, Pretince. "INTERNATIONAL GOVERNMENT ORGANIZATION (IGO) MENURUT HUKUM INTERNASIONAL," 1997.

History, Early, Civil Society, Decade Report, Monitor Media, and Peace News. "Global Movement for a Culture of Peace," n.d., 3–5.

Idrus, Pizaro Gozali. "AIPR Prioritaskan Studi Resolusi Konflik Sebagai Pegangan ASEAN." *Anadolu Agency*, 2018. <https://www.aa.com.tr/id/headline-hari/aipr-prioritaskan-studi-resolusi-konflik-sebagai-pegangan-asean/1050216#>.

Indrawan, Jerry. "Mekanisme Resolusi Konflik Di ASEAN: ASEAN Sebagai Fasilitator Konflik." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 17, no. 2 (2021): 172–85. <https://doi.org/10.26593/jihi.v17i2.3830.172-185>.

"IPCRA , IKA Unhan Dan APPRA Menggelar Webinar Bertajuk Bersama Membentuk Perdamaian Untuk Membangun Budaya Damai Di Kawasan Asia Tenggara," 2020.

Jondar1*, Aloysius, Agus Purbo Widodo2, Johan De Fretes3, Lukman Hakim4, Susanto5, and Muhammad Sujud. "JOHAN GALTUNG ' S CONCEPT OF PEACE CULTURE AND ITS IMPLEMENTATION IN INDONESIA" 6, no. 2 (2022): 230–53.

"Kolaborasi ASEAN-UN Diharapkan Perkuat Budaya Damai Di Kawasan," no. April (2013).

Krisman, Khanisa. "This Review Consists Ofviews on ASEAN Development Related to the Three Pillars OfASEAN Community and the Problem in Those Three Background Issues Politic and Security Economy and Socio Culture Looking Forward The ASEAN Community in 2015 the Review Tries T," 2015, 159–67.

Kusumah, R. Wildan Pratama Indra. "Jalan Damai Menuju Keamanan Regional: Pendekatan Asean Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Laut China Selatan." *FACTUM: Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah* 7, no. 2 (2018): 255–68. <https://doi.org/10.17509/factum.v7i2.15610>.

Lesza Leonardo Lombok. "TANTANGAN ASEAN POLITICAL – SECURITY COMMUNITY DALAM MEWUJUDKAN KAWASAN YANG AMAN, DAMAI DAN STABIL DI WILAYAH PERBATASAN DAN PULAU – PULAU TERLUAR," 2018, 4–5.

Mangku, Dewa Gede Sudika. "Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingya : Dalam Perspektif ASEAN." *Media Komunikasi FIS* 12, no. 2 (2013): 60–69.

Mardhiah, Ainul. "PROSES MEMBANGUN BUDAYA DAMAI MELALUI PENDIDIKAN ISLAM" 3, no. 1 (2018): 10–27. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.

Mayor, Federico. "Culture of Peace," 2000.

Ministry of Foreign Affairs of Indonesia. "Menlu Retno Kepada ASEAN Youth : Jadilah Agen Toleransi Dan Duta Perdamaian," no. 1 (2018): 1–2. <https://asean-aipr.org/fm-retno-to-asean-youth-be-the-agent-for-tolerance-and-ambassadors-for-peace/>.

Mulyana, Imam, and Irawati Handayani. "Peran Organisasi Regional Dalam Pemeliharaan Perdamaian Dan Keamanan Internasional," 2011, 110.

Nasir, Muhammad, and Wan Siti Adibah Wan Dahalan. "Penyelesaian Pertikaian Kepulauan Spratly : Memanfaatkan Perjanjian Pembangunan Bersama." *Jurnal Ilmu Hukum REUSAM* VI No.1 (2017): 19–40.

Nau, Novriest Umbu Walangara, and Jet Sahertian. "Efektivitas Pembentukan Asean Institute for Peace and Reconciliation Dalam Menangani Konflik Di Kawasan Asia Tenggara." *Frequency of International Relations (FETRIAN)* 3, no. 1 (2021): 1–32. <https://doi.org/10.25077/fetrian.3.1.1-33.2021>.

Novitasari, Choirunnisa Nur. "Analisis Putusan Mahkamah Internasional Dalam Kasus Sengketa Indonesia-Malaysia Mengenai Pulau Sipadan Dan Ligitan." *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence* 2, no. 2 (2021): 231–62. <https://doi.org/10.15294/digest.v2i2.48638>.

Rachman, Rahaditya, and Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. "Politik Luar Negeri Indonesia - Konflik Sipadan & Ligitan," no. December (2019).

Rusiti. "Analisis Kasus Sengketa Kepemilikan Pulau Sipadan," 2018.

Ryan, Cooper, and Tauer. "ASEAN-IPR Annual Report 2018." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2018, 12–26.

Sani, S. "Analisis Resolusi Konflik Di Thailand Selatan: Melalui Pendekatan Teori Collective Identity," 2019. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/18450%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/18450/15323129.pdf?sequence=11&isAllowed=y>.

Sardi, Martinus. "Dialog Kebangsaan: Membangun Budaya Perdaamaan Dalam Perspektif Al Qur'an." *Repository.Umy.Ac.Id*, 2017, 1–8. http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/13968/Martinus_Sardi_Dialog_Kebangsaan_Membangun_Budaya_Perdamaian_Dalam_Perspektif_Al_Qur'an.pdf?sequence=1.

Setiawan, Ipung Pramudya, and Made Selly Dwi Suryanti. "Keterlibatan Asean Dalam Menangani Konflik Myanmar (Studi Kasus: Konflik Etnis Rohingya 2017 – 2019)." *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan* 1, no. 2 (2021): 83–97. <https://doi.org/10.22225/politicos.1.2.2021.83-97>.

Sukma Sushanti, S.Si.,M.Si., SUKMA SUSHANTI. "Persepsi Ancaman Di Kawasan Asia Tenggara - Peran ASEAN Sebagai Primary Driving Force," 2016, 6.

Tillman, Diane G. "Educating for a Culture of Peace in Refugee Camps." *Childhood Education* 77, no. 6 (2001): 375–78. <https://doi.org/10.1080/00094056.2001.10521673>.

Triono. "Peran ASEAN Dalam Konflik Etnis Rohingnya." *Jurnal TAPIs* 10, no. 2 (2014): 1–11.

Triwahyuni, Dewi. "Signifikansi Kawasan Asia Tenggara Dalam Kepentingan Amerika Serikat." *Majalah Ilmiah UNIKOM* 9, no. 1 (2011): 33–44. https://jurnal.unikom.ac.id/_s/data/jurnal/v09-n01/volume-91-artikel-4.pdf/pdf/volume-91-artikel-4.pdf.

UMY. "ASEAN Contoh Kawasan Yang Bisa Selesaikan Konflik Dengan Damai," 2016. <https://www.umat.ac.id/asean-contoh-kawasan-yang-bisa-selesaikan-konflik-dengan-damai>.

Wahyuni, Made Dwi, Dewa Gede, Sudika Mangku, Ni Putu, Rai Yuliantini, Universitas Pendidikan Ganesha, Universitas Bung Karno, and Hubungan Internasional. "Peranan Organisasi Internasional Dalam Menjalin Hubungan Kerjasama Internasional Antar Anggota" 3 (2023): 20–29.

Zulfikar, Achmad. "Efektivitas Peran ASEAN Dalam Mengatasi Masalah Human Security Di Kawasan Asia Tenggara," 2017, 1–15. <https://doi.org/10.31227/OSF.IO/8Q264>.